



## Implementasi Kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Palu

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Palty Zainal Sibarani Universitas Tadulako <a href="mailto:balaipalty@gmail.com">balaipalty@gmail.com</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 1, April 2026 <a href="http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Mashuri H. Tahili Universitas Tadulako <a href="mailto:MashuriH.Tahili@gmail.com">MashuriH.Tahili@gmail.com</a>	
Subhan Haris Universitas Tadulako <a href="mailto:SubhanHaris@gmail.com">SubhanHaris@gmail.com</a>	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Sibarani, P. Z., Tahili, M. H & Haris, S. (2026). Implementasi Kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Palu. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1),874-885.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2023. Penelitian menggunakan model implementasi George C. Edward III dengan empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum optimal. Sosialisasi kebijakan belum merata sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman aparatur. Selain itu, kompetensi teknis pegawai masih terbatas, sementara konsistensi penerapan dan kepatuhan terhadap standar belum maksimal. Dari sisi struktur birokrasi, meskipun pedoman dan prosedur telah tersedia, pengawasan dan evaluasi masih lemah sehingga terjadi ketidaksesuaian dalam praktik administrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh interaksi keempat variabel tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi pengawasan, serta komitmen pimpinan guna mewujudkan administrasi pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan profesional.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Tata Naskah Dinas, George C. Edward III, Administrasi Publik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

### Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Official Correspondence Guidelines policy at the Department of Education and Culture of Palu City based on Mayor Regulation No. 19 of 2023. The study employs George C. Edward III's policy implementation model, which consists of four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results indicate that the policy implementation has been carried out, but not yet optimally. Policy dissemination has not been evenly conducted, leading to differences in understanding among officials. In addition, the technical competence of staff remains limited, while consistency in implementation and compliance with standards is still inadequate. In terms of bureaucratic structure, although guidelines and standard operating procedures are available, supervision and evaluation remain weak, resulting in inconsistencies in administrative practices. This study concludes that the effectiveness of policy implementation is influenced by the interaction of these four variables. Therefore, strengthening policy dissemination, enhancing staff capacity, optimizing internal supervision, and ensuring leadership commitment are necessary to achieve orderly, accountable, and professional public administration.

**Key Words:** Policy Implementation, Official Correspondence Guidelines, George C. Edward III, Public Administration, Department of Education and Culture of Palu City.

### A. Pendahuluan

Dalam era reformasi birokrasi dan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi tuntutan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan adalah pengelolaan administrasi yang tertib dan terstandarisasi, khususnya dalam hal tata naskah dinas. Tata naskah dinas merupakan alat komunikasi tertulis yang sangat vital dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan daerah secara profesional dan akuntabel.

Kota Palu sebagai salah satu daerah otonom memiliki Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah daerah. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman baku dalam penyusunan, pengelolaan, dan pengendalian surat-menyurat kedinasan agar tercipta keseragaman, keterpaduan, dan kelancaran komunikasi administrasi di seluruh perangkat daerah.

Secara filosofis, tata naskah dinas adalah manifestasi nilai-nilai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi. Pengelolaan tata naskah dinas yang terstandarisasi mencerminkan etos dan kultur birokrasi yang mengedepankan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Konsep filosofis ini menegaskan bahwa administrasi publik tidak sekadar soal teknis, melainkan bagian integral dari upaya mewujudkan nilai luhur dalam pelayanan masyarakat dan pengendalian kekuasaan.

Normativitas dari tata naskah dinas tercermin pada keharusan mengikuti prinsip, aturan, dan pedoman hukum yang telah ditetapkan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 dan turunannya Peraturan Walikota Palu Nomor 19 Tahun 2023. Konsep normatif menghendaki setiap aparatur pemerintah daerah mematuhi seluruh ketentuan terkait administrasi surat-menyurat, termasuk format, mekanisme penerbitan, hingga klasifikasi dokumen. Kepatuhan terhadap norma-norma ini merupakan prasyarat bagi terciptanya keteraturan administrasi dan penegakan hukum administrasi negara.

Konsep empiris dalam penelitian ini berfokus pada realitas yang terjadi di lapangan, yang menunjukkan masih terdapat celah antara regulasi dan pelaksanaan tata naskah dinas. Survei nasional dan kajian internasional menunjukkan bahwa ketidakteraturan dalam tata naskah dinas berpotensi menimbulkan inefisiensi birokrasi, kesalahan komunikasi, dan menurunnya kualitas pelayanan publik. Data dari penelitian di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah mengindikasikan bahwa ketidaksesuaian format dan prosedur tata naskah dinas mencapai angka signifikan, sehingga berdampak pada efektivitas komunikasi kedinasan dan pengendalian administrasi. Selain itu, di Kota Tangerang Selatan, pelatihan dan pendidikan bagi aparatur RT dan RW dalam tata naskah dinas menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur masih memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, sehingga mempengaruhi pemahaman

dan penerapan tata naskah dinas yang efektif. Kondisi ini menggambarkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.

Ketidaktelesmpurnaan dalam implementasi tata naskah dinas juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan komitmen pimpinan dalam menegakkan peraturan. Penelitian di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan bahwa faktor sosialisasi, standarisasi kode, penggunaan sistem informasi, dan kebiasaan menjadi penghambat utama dalam penerapan tata naskah dinas sesuai regulasi yang berlaku.

Secara teoritis, tata naskah dinas dapat dianalisis melalui teori administrasi publik, teori implementasi kebijakan, serta prinsip manajemen kualitas. Menurut teori implementasi kebijakan, keberhasilan sebuah regulasi tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pelaksana (implementor), sumber daya, karakteristik organisasi, serta lingkungan eksternal dan internal. Teori administrasi publik menekankan pentingnya POS dan standarisasi prosedur sebagai instrumen pengendalian internal dan peningkatan efisiensi birokrasi. Teori good governance juga relevan, di mana tata naskah dinas diposisikan sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mendasar dalam tata kelola administrasi pemerintahan daerah, khususnya di Kota Palu, yang membutuhkan kajian mendalam terkait pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023. Penelitian kualitatif menjadi metode yang tepat untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta kendala yang dihadapi oleh aparatur dalam mengimplementasikan peraturan tersebut secara holistik dan kontekstual.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci proses implementasi peraturan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Palu, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pentingnya tata naskah dinas dalam pemerintahan daerah tidak hanya sebagai alat komunikasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dengan adanya tata naskah dinas yang terstandarisasi, diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih, pemborosan, dan kesalahan komunikasi yang selama ini terjadi.

Peraturan Walikota Palu Nomor 19 Tahun 2023 merupakan turunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang adalah upaya pemerintah daerah Kota Palu dalam menyesuaikan tata naskah dinas dengan perkembangan organisasi dan teknologi informasi yang semakin maju. Namun, perubahan regulasi ini harus diikuti dengan upaya sosialisasi, pelatihan, dan monitoring yang berkelanjutan agar dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh unit kerja pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan tata naskah dinas.

Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dapat mendukung implementasi peraturan tersebut secara optimal. Dengan kerangka pemikiran filosofis, normatif, empiris, dan teoritis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai implementasi Peraturan Walikota Palu Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, sebagai dasar rekomendasi kebijakan dan strategi peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan daerah yang lebih baik dan profesional di Kota Palu.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan publik untuk memahami bagaimana Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dijalankan dalam praktik administrasi pemerintahan. Implementasi dipandang sebagai proses penting yang menghubungkan kebijakan dengan realitas di lapangan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komunikasi, sumber daya, budaya organisasi, serta mekanisme pengawasan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, sehingga mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika pelaksanaan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Palu.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan informan yang dipilih secara purposive, seperti pejabat struktural dan staf administrasi yang terkait langsung dengan pengelolaan tata naskah dinas. Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan sekunder yang saling melengkapi melalui teknik triangulasi untuk

meningkatkan validitas temuan. Teknik ini memungkinkan peneliti menangkap pengalaman, persepsi, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan secara lebih mendalam dan kontekstual.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil analisis difokuskan pada identifikasi pola implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak kebijakan terhadap tata kelola administrasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan serta kualitas administrasi pemerintahan di Kota Palu.

### C. Hasil dan Pembahasan

Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, sumber daya merupakan indikator penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena kebijakan tidak hanya menuntut kejelasan aturan, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat dilaksanakan secara efektif. Sumber daya yang dimaksud mencakup ketersediaan sumber daya manusia, kompetensi pelaksana, sarana dan prasarana pendukung, serta alokasi anggaran yang menunjang pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks penelitian "Implementasi Kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu", indikator sumber daya menjadi krusial mengingat pelaksanaan pedoman tersebut sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam memahami dan menerapkan ketentuan tata naskah dinas, dukungan fasilitas persuratan, serta sistem administrasi yang digunakan. Keterbatasan atau ketidaksesuaian sumber daya berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan, sementara ketersediaan sumber daya yang memadai akan mendorong terciptanya tertib administrasi, keseragaman naskah dinas, dan efektivitas kinerja organisasi.

Untuk mengetahui bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas, peneliti melakukan wawancara dengan Hardi, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Wawancara ini memberikan gambaran mengenai kondisi sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta upaya yang dilakukan pimpinan dalam mengatasi keterbatasan sumber daya agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Adapun pernyataan lengkap informan adalah sebagai berikut:

*"Dari sisi sumber daya manusia, secara kuantitas jumlah pegawai yang menangani administrasi persuratan sudah mencukupi. Akan tetapi, secara kualitas masih terdapat variasi kompetensi, khususnya dalam pemahaman teknis tata naskah dinas yang sesuai standar. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan atau bimbingan teknis secara berkala."*

Hardi melanjutkan:

*"Untuk sarana prasarana, fasilitas seperti komputer, printer, dan perangkat pendukung administrasi sudah tersedia. Namun belum ada sistem aplikasi khusus yang secara otomatis menstandarkan format surat dinas. Sehingga masih sangat bergantung pada ketelitian individu." (Kamis, 20 November 2025 pukul 10.00 WITA)*

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), kuantitas pegawai sudah memadai namun kualitas kompetensi teknisnya masih beragam, sehingga diperlukan pelatihan berkala untuk mencapai standar yang seragam. Sementara dari aspek Sarana dan Prasarana, meskipun perangkat keras (komputer dan printer) sudah tersedia lengkap, organisasi tersebut masih mengalami kekosongan sistem automasi atau perangkat lunak khusus yang dapat mengunci format surat secara otomatis. Hal ini mengakibatkan proses administrasi masih sangat berisiko terhadap kesalahan manusia (human error), karena standarisasi dokumen sepenuhnya bergantung pada ketelitian individu masing-masing pegawai tanpa adanya sistem kendali digital yang baku.

Untuk memperoleh pandangan dari sisi pengelolaan internal organisasi terkait ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, peneliti melakukan wawancara dengan Evi Oktavia, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Wawancara ini memberikan penjelasan mengenai kondisi sumber daya manusia, dukungan sistem dan fasilitas kerja, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan dinas. Adapun pernyataan lengkap informan adalah sebagai berikut:

*"Jumlah staf administrasi secara umum sudah mencukupi untuk menangani kebutuhan persuratan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Akan tetapi, dari sisi kompetensi teknis masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman terhadap pedoman tata naskah dinas. Tidak semua pegawai pernah mengikuti pelatihan khusus, sehingga"*

*pemahaman mereka sebagian besar diperoleh dari pengalaman kerja dan arahan pimpinan. Dari segi sarana dan prasarana, fasilitas seperti komputer, printer, dan jaringan internet sudah tersedia dan cukup mendukung pelaksanaan administrasi.” (Kamis, 20 November 2025 pukul 12.00 WITA)*

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memiliki kecukupan kuantitas staf dan sarana prasarana yang memadai (komputer, printer, internet), namun menghadapi tantangan serius pada aspek standarisasi kompetensi. Masalah utama terletak pada proses transfer pengetahuan yang masih bersifat informal dan otodidak, di mana pegawai mengandalkan pengalaman pribadi atau arahan pimpinan alih-alih pelatihan formal yang tersertifikasi. Akibatnya, pemahaman terhadap pedoman tata naskah dinas menjadi tidak seragam di antara staf, yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan program pengembangan kapasitas pegawai melalui pelatihan khusus guna menjamin konsistensi dan profesionalisme administrasi di seluruh unit kerja.

Untuk menggambarkan kondisi sumber daya pada tingkat pelaksana administrasi, peneliti menggali informasi melalui wawancara dengan Masnuni, selaku Kepala Sub Bagian Umum yang menangani ketatausahaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Wawancara ini memberikan gambaran mengenai pemanfaatan sumber daya, kendala teknis yang dihadapi dalam penggunaan sistem dan pedoman, serta kebutuhan pendampingan dan fasilitas kerja dalam mendukung implementasi Pedoman Tata Naskah Dinas. Adapun pernyataan lengkap informan adalah sebagai berikut:

*“Pedoman tata naskah dinas tersedia yaitu lampiran yang ada di Perwali. Selain itu, kami juga menyediakan beberapa contoh format surat sebagai referensi praktis bagi staf. Namun demikian, staf kami masih sedikit, ini diperparah dengan pelatihan formal khusus tata naskah dinas belum pernah dilakukan selama saya menjabat sebagai Kasubbag Umum.” (Jumat, 21 November 2025 pukul 09.00 WITA)*

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa meskipun organisasi telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) serta dukungan alat bantu berupa contoh format surat (templat), implementasinya di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Masalah utama yang diidentifikasi adalah kurangnya kuantitas staf dan ketiadaan program pelatihan formal (Bimtek) selama masa jabatan Kasubbag Umum saat ini, yang mengakibatkan kompetensi staf dalam menerapkan pedoman tersebut tidak terasah secara profesional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan regulasi dengan kapasitas eksekusi, di mana referensi praktis yang ada belum cukup untuk menutupi minimnya jumlah personel dan pengembangan keahlian mereka.

Untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pemanfaatan sumber daya pada level pelaksana teknis, peneliti melakukan wawancara dengan Lutfi, selaku admin yang menangani pengetikan dan pengelolaan surat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Wawancara ini memberikan penjelasan mengenai pengalaman langsung informan dalam menggunakan sumber daya pendukung kebijakan, kendala teknis yang dihadapi, serta kebutuhan peningkatan panduan dan pelatihan dalam implementasi Pedoman Tata Naskah Dinas. Adapun pernyataan lengkap informan adalah sebagai berikut:

*“Fasilitas kerja seperti komputer, printer, dan akses internet sudah tersedia dan cukup mendukung pelaksanaan tugas. Namun belum tersedia template resmi yang terkunci formatnya, sehingga dalam penyusunan surat masih diperlukan ketelitian tinggi agar sesuai dengan pedoman. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi Srikandi, jadi pekerjaan saya sedikit terbantu.”*

Lutfi melanjutkan:

*“selama menjabat di persuratan, belum pernah sekalipun mendapat pelatihan” (Palu Jumat, 21 November 2025 pukul 11.30 WITA)*

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa meskipun sarana prasarana (komputer, printer, dan internet) sudah memadai dan kehadiran aplikasi Srikandi telah membantu digitalisasi administrasi, masih terdapat celah besar pada aspek standarisasi dan pengembangan kompetensi. Masalah utama terletak pada ketiadaan templat resmi yang baku (terkunci), sehingga akurasi format surat masih sepenuhnya bergantung pada ketelitian individu yang berisiko tinggi terhadap kesalahan (human error). Hal ini diperparah dengan pengakuan bahwa staf pelaksana sama sekali belum pernah mendapatkan pelatihan formal, yang mengindikasikan bahwa penguasaan teknologi (seperti aplikasi Srikandi) dan pemahaman tata naskah dinas selama ini hanya dilakukan secara otodidak tanpa bimbingan teknis yang terstruktur.

Tabel 4.3. Jumlah Surat Keluar 2023—2025

Tahun	Jumlah Surat Keluar	Rata-rata Per Bulan	Kenaikan/Penurunan
2023	2.450	204	15.01%
2024	2.875	240	17.30%
2025	3.120	260	8.50%
<b>TOTAL</b>	<b>8.445</b>	<b>235</b>	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

Selain aspek kompetensi dan fasilitas kerja, tingkat beban kerja administrasi juga menjadi bagian penting dalam analisis sumber daya implementasi kebijakan tata naskah dinas. Beban kerja tersebut dapat dilihat dari jumlah surat keluar yang diproduksi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu setiap tahun. Data menunjukkan bahwa jumlah surat keluar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 2.450 surat pada tahun 2023, meningkat menjadi 2.875 surat pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 3.120 surat pada tahun 2025. Rata-rata jumlah surat yang dihasilkan mencapai sekitar 235 surat per bulan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas administrasi persuratan cukup tinggi sehingga menuntut dukungan sumber daya manusia dan fasilitas kerja yang memadai agar pelaksanaan tata naskah dinas dapat berjalan secara efektif.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi persuratan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu juga didukung oleh penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang membantu proses pengelolaan surat secara digital.

Untuk melengkapi pemahaman mengenai dukungan sumber daya pada tingkat satuan pendidikan, peneliti melakukan wawancara dengan Nurjannah selaku Staff Tata Usaha Sekolah SD Impres 2 Kamonji Kecamatan Palu Barat. Wawancara ini memberikan gambaran tentang pemanfaatan sumber daya kebijakan, tingkat kemudahan akses dan pemahaman teknis, serta kendala yang dihadapi sekolah dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan pedoman dan sistem persuratan. Adapun pernyataan lengkap informan adalah sebagai berikut:

*"Selama saya di sekolah ini, sepertinya belum pernah ada sosialisasi ya, dan selama ini juga belum pernah ada sosialisasi untuk hal administrasi"*

Marini menamahkan:

*"Sumber daya pendukungnya lengkap: komputer lancar, template siap pakai, dua staf admin berpengalaman, dan printer multifungsi dari dana sekolah." (Kamis 27 november 2025 pukul 10.00 WITA)*

Kutipan tersebut menggambarkan adanya kontradiksi antara aspek komunikasi kebijakan dan ketersediaan sumber daya di tingkat sekolah. Secara operasional, sekolah telah memiliki kemandirian yang kuat karena didukung oleh sarana prasarana lengkap (komputer, printer multifungsi), templat siap pakai, serta tenaga administrasi berpengalaman yang didanai secara internal. Namun, secara sistemik terdapat kekosongan interaksi formal dari instansi pembina, di mana pihak sekolah mengaku sama sekali belum pernah menerima sosialisasi terkait aturan administrasi maupun tata naskah dinas. Hal ini menunjukkan bahwa kelancaran administrasi di sekolah tersebut lebih didorong oleh inisiatif dan modal internal sekolah, bukan hasil dari pembinaan atau transfer pengetahuan yang terstruktur dari Dinas Pendidikan.

Selanjutnya, untuk memperoleh perspektif lain mengenai ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam implementasi Pedoman Tata Naskah Dinas, peneliti melakukan wawancara dengan Abdul Rasyid, S.Pd., M.Pd. Kepala Sekolah SMPN 19 Palu Kecamatan. Wawancara ini mengungkap pandangan informan terkait kecukupan pedoman yang disediakan pemerintah, tingkat fleksibilitas penerapannya di sekolah, serta kendala sumber daya manusia dan waktu dalam memahami pembaruan kebijakan. Adapun pernyataan informan adalah sebagai berikut:

*"Belum pernah ada sosialisasi atau pelatihan sampai saat ini. Untuk komputer dan template ada, staf admin kompeten dengan pelatihan rutin, printer oke tapi kertas sering kurang." Mantikulore (Jumat 5 Desember 2025 pukul 10.00 WITA)*

Kutipan tersebut menggambarkan kondisi operasional sekolah yang memiliki kemandirian teknis yang baik namun minim pembinaan formal dari instansi pembina. Secara internal, sekolah telah memiliki sumber daya manusia yang kompeten berkat inisiatif pelatihan rutin mandiri serta dukungan fasilitas komputer dan templat yang memadai. Namun, terdapat dua hambatan utama: pertama, kekosongan sosialisasi dari pihak luar (Dinas) yang menyebabkan pembaruan aturan administrasi tidak tersampaikan secara resmi; dan kedua, kendala logistik

mikro berupa keterbatasan ketersediaan kertas yang dapat menghambat kelancaran operasional harian meskipun perangkat keras (printer) dalam kondisi prima.

Untuk mengetahui sejauh mana dukungan sumber daya memengaruhi pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah dasar, peneliti juga menggali pengalaman informan terkait ketersediaan fasilitas, kemampuan sumber daya manusia, serta dukungan teknis dari pemerintah daerah. Aspek ini penting dianalisis karena dalam perspektif teori implementasi George C. Edward III, sumber daya merupakan faktor krusial yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dijalankan di lapangan. Wawancara dilakukan dengan Vira Septianti Staff Tata Usaha Sekolah SD Karya Thoyyiba Mamboro. Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan tersebut.

*“Belum ada pelatihan khusus. Kami lebih banyak belajar dari contoh surat yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Komputer dan printer ada, tetapi jumlahnya terbatas. Staf administrasi juga hanya satu orang, tapi bukan masalah untuk mengolah naskah dinas dari Disdik.” (senin 24 november 2025 pukul 07.30 WITA)*

Kutipan tersebut menjelaskan kondisi administrasi di tingkat sekolah yang sangat mengandalkan metode belajar mandiri (learning by doing) akibat ketiadaan program pengembangan kapasitas formal. Meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya—baik dari segi jumlah perangkat (komputer/printer) maupun jumlah personil yang hanya bertumpu pada satu orang staf—operasional administrasi tetap berjalan melalui pemanfaatan arsip lama sebagai rujukan utama. Hal ini menunjukkan adanya resiliensi staf yang tinggi, namun di sisi lain mengungkap risiko terjadinya penyalinan kesalahan yang berulang (error replication) karena standar penulisan hanya didasarkan pada contoh terdahulu, bukan pada pemahaman pedoman terbaru hasil pelatihan resmi.

Untuk memperdalam pemahaman mengenai dukungan sumber daya dalam implementasi kebijakan di tingkat sekolah menengah pertama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Taslim Staff Tata Usaha Sekolah SMPN 6 Palu Kecamatan Palu Selatan. Wawancara ini bertujuan menggali kondisi riil ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang disediakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023. Berikut kutipan hasil wawancara informan tersebut.

*“Pelatihan khusus belum pernah secara formal, tetapi kami mendapatkan penjelasan saat rapat koordinasi. Selebihnya kami belajar mandiri dari pedoman yang diberikan.”*

Hartadi melanjutkan:

*“Sekolah kami punya computer, printer plus satu staf administrasi yang lumayan kompeten. (selasa 25 november 2025 pukul 10.00)*

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa proses peningkatan kompetensi staf di sekolah dilakukan melalui pendekatan informal dan mandiri sebagai pengganti pelatihan formal yang belum tersedia. Meskipun tidak ada program pengembangan kapasitas yang terstruktur (Bimtek), transfer pengetahuan tetap terjadi melalui sesi penjelasan singkat dalam rapat koordinasi serta inisiatif staf untuk mempelajari pedoman secara otodidak. Dari sisi infrastruktur, sekolah memiliki modal dasar yang cukup memadai dengan ketersediaan perangkat komputer, printer, serta dukungan satu orang tenaga administrasi yang dinilai kompeten dalam menjalankan tugas operasional keseharian.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan sarana fisik dengan pengembangan kapasitas aparatur. Secara kuantitas, jumlah pegawai administrasi baik di tingkat dinas maupun satuan pendidikan dinilai telah mencukupi, namun secara kualitas terdapat variasi kompetensi yang signifikan. Masalah utama terletak pada ketiadaan program pelatihan formal atau bimbingan teknis (Bimtek) yang terstruktur, sehingga para pelaksana cenderung memahami aturan secara otodidak melalui pengalaman kerja atau sekadar meniru format surat yang sudah ada sebelumnya. Hal ini menciptakan risiko terjadinya replikasi kesalahan yang berulang karena standar penulisan dokumen sepenuhnya bergantung pada ketelitian individu, bukan pada pemahaman yang seragam hasil dari proses transfer pengetahuan yang profesional.

Dari sisi sarana dan prasarana, fasilitas perangkat keras seperti komputer, printer, dan jaringan internet telah tersedia memadai untuk mendukung operasional harian. Namun, efektivitas penggunaan fasilitas tersebut masih terhambat oleh kekosongan sistem otomatisasi atau perangkat lunak khusus yang menyediakan templat resmi yang terkunci (locked template). Meskipun kehadiran aplikasi Srikandi telah membantu proses digitalisasi, proses penyusunan naskah dinas masih bersifat manual pada aspek tata letak dan redaksi. Kondisi ini menuntut konsentrasi tinggi dari staf pelaksana agar tetap sesuai dengan Pedoman Tata Naskah Dinas,

mengingat belum adanya instrumen digital yang mampu mengunci standar format dokumen secara otomatis guna meminimalisir faktor kesalahan manusia (human error).

Di tingkat satuan pendidikan, ditemukan fenomena kemandirian operasional yang kuat namun minim dukungan pembinaan dari instansi pembina. Sekolah-sekolah dasar dan menengah di Kota Palu pada umumnya telah memiliki modal dasar yang baik berupa perangkat administrasi dan tenaga pelaksana yang kompeten melalui inisiatif internal. Namun, para kepala sekolah melaporkan adanya kekosongan sosialisasi formal dari Dinas Pendidikan terkait pembaruan pedoman tata naskah. Akibatnya, kelancaran administrasi di sekolah lebih banyak didorong oleh resiliensi staf dan penggunaan arsip lama sebagai rujukan, bukan hasil dari sinergi sumber daya yang terintegrasi antara Dinas dan sekolah. Secara keseluruhan, pemenuhan sumber daya di lingkungan ini masih bersifat "fasilitatif-fisik" namun belum "substantif-kompetensi," sehingga diperlukan penguatan pada aspek pengembangan kapasitas SDM dan standarisasi sistem digital agar kebijakan dapat terimplementasi secara paripurna.

Analisis terhadap indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu menunjukkan adanya ketimpangan antara ketersediaan sarana fisik dengan kesiapan kapasitas manusia. Merujuk pada teori George C. Edward III, keberhasilan implementasi mensyaratkan dukungan sumber daya yang memadai, yang dalam konteks ini dapat dibedah menjadi tiga temuan utama:

Pertama, Sumber Daya Manusia (Staf dan Kompetensi). Edward III menyatakan bahwa jumlah staf saja tidak cukup jika mereka tidak memiliki kompetensi yang diperlukan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa secara kuantitas, jumlah pegawai di Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah sudah mencukupi. Namun, terdapat masalah pada kualitas kompetensi teknis. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas mengakui adanya variasi pemahaman terhadap standar naskah dinas. Hal ini diperparah dengan temuan bahwa staf pelaksana dan pihak sekolah sama sekali belum pernah mendapatkan pelatihan formal atau Bimbingan Teknis (Bimtek) selama masa jabatan pimpinan saat ini. Akibatnya, transfer pengetahuan terjadi secara otodidak atau melalui "belajar mandiri" (learning by doing). Dalam perspektif Edward III, ketiadaan pengembangan kapasitas ini menciptakan risiko kegagalan implementasi karena staf tidak memiliki "keahlian" yang memadai untuk menjalankan instruksi kebijakan secara akurat.

Kedua, Fasilitas dan Teknologi (Sarana Prasarana). Edward III menekankan pentingnya fasilitas sebagai pendukung operasional. Temuan menunjukkan bahwa dari sisi perangkat keras (hardware), sumber daya sudah memadai; komputer, printer, dan internet tersedia baik di Dinas maupun di sekolah. Namun, terdapat kekosongan pada sumber daya teknologi berupa sistem otomatisasi. Meskipun aplikasi Srikandi sudah mulai digunakan, belum tersedia templat resmi yang terkunci (locked template). Hal ini menyebabkan standar naskah masih sangat bergantung pada ketelitian individu, bukan pada sistem. Dalam teori Edward III, keterbatasan fasilitas pendukung yang spesifik (dalam hal ini software standarisasi) dapat menghambat efisiensi meskipun sumber daya fisik lainnya sudah terpenuhi.

Ketiga, Informasi dan Wewenang (Informasi sebagai Sumber Daya). Edward III menggolongkan informasi mengenai cara melakukan sesuatu sebagai sumber daya krusial. Temuan di tingkat satuan pendidikan (SD dan SMP) mengungkap bahwa sekolah memiliki kemandirian fasilitas (dana mandiri untuk printer dan staf), namun mereka kekurangan sumber daya informasi dari instansi pembina. Para kepala sekolah melaporkan kekosongan sosialisasi formal terkait aturan naskah dinas yang baru. Akibatnya, sekolah menggunakan arsip lama sebagai rujukan, yang berisiko menciptakan replikasi kesalahan (error replication). Hal ini menunjukkan bahwa sinergi sumber daya antara Dinas dan sekolah belum terbangun, di mana sekolah memiliki fasilitas fisik tetapi kekurangan "informasi teknis" sebagai sumber daya non-fisik yang krusial.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh interaksi empat variabel dalam model George C. Edward III. Dari aspek komunikasi, penyampaian kebijakan belum berjalan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga masih terdapat perbedaan pemahaman pada tingkat teknis operasional yang berdampak pada ketidakseragaman praktik administrasi. Pada aspek sumber daya, meskipun pedoman telah tersedia secara formal, keterbatasan kompetensi teknis aparatur dan minimnya pelatihan berkelanjutan menjadi hambatan dalam penerjemahan kebijakan secara operasional.

Sementara itu, dari aspek disposisi, secara umum aparaturnya menunjukkan sikap yang positif dan mendukung implementasi kebijakan, namun dalam praktiknya masih ditemukan inkonsistensi akibat adanya penyesuaian subjektif terhadap aturan yang dianggap kaku. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan yang konsisten terhadap standar yang telah ditetapkan. Di sisi lain, struktur birokrasi telah tersusun dengan baik, didukung oleh prosedur operasional standar yang jelas dan alur koordinasi yang terarah, sehingga mampu memberikan landasan organisasi yang kuat dalam pelaksanaan tata naskah dinas.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini telah berjalan namun belum mencapai tingkat optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek komunikasi yang lebih teknis dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peneguhan komitmen terhadap kepatuhan standar, serta optimalisasi fungsi pengawasan agar tercipta administrasi pemerintahan yang lebih tertib, seragam, dan akuntabel.

## E. Referensi

- Agustina, F. (2019). Analisis implementasi tata naskah dinas dalam pembuatan surat dinas di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM). *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 12(2).
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Ammara Jauza, N., & Albina, M. (2025). [Judul artikel]. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2).
- Ammara Jauza, N., & Albina, M. (2025). Strategi guru pendidikan agama Islam dalam membina toleransi. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2).
- Apriyanti, Y., Lorita, E., & Yusuarsono. (2019). Kualitas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 6(1).
- Arvyanda, R., Fernandito, E., & Landung, P. (2023). Analisis pengaruh perbedaan bahasa dalam komunikasi antarmahasiswa. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1(1), 67-82.
- Astuti, M. (2025). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi. *Jurnal Pendidikan Tematik*, 7(2), 2896-2910.
- Azizah, N. (2019). Inovasi Pelayanan SAMSAT PATEN di Kabupaten Magelang. (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Tidar, Magelang.
- Bappeda Kota Palu. (2022). Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026. Diakses dari <https://bappeda.palukota.go.id/web/wp-content/uploads/2022/08/RENSTRA-SETDA-2021-sd.-2026.pdf>
- Bimteknas. (2025). Bimtek Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah. Diakses dari <https://www.informasibimtek.com/bimtek-tata-naskah-dinas-pemerintah-daerah/>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: Konsep pelaksanaan. Jakarta: JRTI Press.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83-88.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. (2025). Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan Penggunaan Bahasa di Ruang Publik. Diakses dari <https://pendidikan.gunungkidulkab.go.id/berita/5113-sosialisasi-tata-naskah-dinas-dan-penggunaan-bahasa-di-ruang-publik-dinas-pendidikan-kabupaten-gunungkidul>
- Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-12.
- Hanindita, H. (2017). Persepsi pustakawan pada fungsi humas di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro (Tesis, Universitas Diponegoro). <http://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/57/30> (Ammara Jauza, N., & Albina, M. (2025))
- <http://stipram.co.id> (Arvyanda, R., Fernandito, E., & Landung, P. (2023))
- <https://adoc.pub/perjalanan-panjang-ilmu-administrasi-publik-dari-paradigma-k.html> (Johan, S. (2023))
- <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320/2430> (Siregar, N. (2022))
- <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224> (Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016))
- <https://doi.org/10.22146/khazanah.48091> (Agustina, F. (2019))

- <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12674> (Model Implementasi Kebijakan Publik. (2024))
- <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839> (Apriyanti, Y., Lorita, E., & Yusuwarsono. (2019))
- <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93> (Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024))
- <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i06.1225> (Nafillah, N., & Hidayat, R. (2024))
- <https://doi.org/10.61787/taceee75> (Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025))
- [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2023/09/126.%20Hlmn%20Persetujuan%20Jurnal%20Rizka%20Indriani%20Julfitri%202019\\_signed%20\(09-11-23-07-24-17\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2023/09/126.%20Hlmn%20Persetujuan%20Jurnal%20Rizka%20Indriani%20Julfitri%202019_signed%20(09-11-23-07-24-17).pdf) (Julfitri, R. I., & Prakoso, C. T. (2023))
- <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/56289/44346> (Zharfan, Q. A., & Tauran. (2023))
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/download/34838/32678/73631> (Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lapian, M. T. (2021))
- <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/view/5668> (Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022))
- <https://eprosiding.snit-polbeng.org/index.php/snit/article/download/667/493/> (Politeknik Negeri Bengkalis. (2024))
- <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti/article/view/906/635> (Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021))
- <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374> (Rijali, A. (2019))
- <https://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektif-model.pdf> (Imronah. (2016))
- <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf> (Akib, H. (2010))
- <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/download/3495/2456/12539> (Jaelani, D., Kurhayadi, & Kushendar, D. H. (2023))
- Imronah. (2016). Implementasi kebijakan: Perspektif, model dan kriteria pengukurannya. Jakarta: Ilmu Administrasi Publik Press.
- Imronah. (2016). Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1–15.
- Infoperaturan.id. (2024). Peraturan Walikota Palu Nomor 19 Tahun 2023. Diakses dari <https://infoperaturan.id/kota/peraturan-walikota-palu-nomor-48-tahun-2017/>
- Jaelani, D., Kurhayadi, & Kushendar, D. H. (2023). Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 705–720.
- JDIH Kota Palu. (2017). Peraturan Walikota Palu Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Diakses dari [http://jdih.palukota.go.id/Peraturan/searching/?id\\_peraturan\\_cat=83](http://jdih.palukota.go.id/Peraturan/searching/?id_peraturan_cat=83)
- Johan, S. (2023). Perjalanan panjang ilmu administrasi publik (dari paradigma klasik menuju kontemporer).
- Julfitri, R. I., & Prakoso, C. T. (2023). Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dalam Mengakses Fasilitas Publik di Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Publik*, 11(3), 682–694.
- Jumroh, Dr., & Pratama, M. Y. (2021). Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik. Padang: Insan Cendekia Mandiri.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi terbaru). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Keban, Yeremias T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2013). Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/03/bn69-2013lamp.pdf>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Edisi Ketiga). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Model Implementasi Kebijakan Publik. (2024). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 17929–17938.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. Jakarta: Review Politik Press.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.
- Nafillah, N., & Hidayat, R. (2024). Optimalisasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan Sesuai Dengan Pedoman Resmi Pada Dinas PUPR Provinsi. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(6), 713-722.
- Nafillah, Nafillah & Rahmad Hidayat. (2024). Optimalisasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan Sesuai Dengan Pedoman Resmi Pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(06), 713-722.
- Nugroho, R. (2013). Implementasi kebijakan publik: Teori, proses, dan aplikasinya (hal. 89). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, R. (2017). Public policy: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, dan manajemen politik kebijakan publik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo12.
- Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Politeknik Negeri Bengkalis. (2024). Analisis Kesiapan dan Kendala Implementasi Standar Pelayanan. Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT).
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77-84.
- Ridwan. (2005). Metode Penelitian: Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, dan Lainnya. Universitas Medan Area.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-90.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. Palembang: Alhadharah Publishing.
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara, dan kuesioner. Yogyakarta: JISOSEPOL Press.
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara, dan kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 39-47.
- Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid-19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1-11.
- Siregar, N. (2022). Menentukan model implementasi kebijakan dalam menganalisis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator (PKA). Medan: JISOS Publisher.
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713–722.
- Subarsono, A. G. (2005/2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tahili, M.H. dan Halim, R. (2026). Transformasi Digital dalam Administrasi Publik: Konsep dan Teori. PT. Dinamika Publisng International.
- Tahir, Arifin. (2011). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Technojogja. (2024). Bimtek Tata Naskah Dinas untuk SDM di SETDA Kabupaten/Kota. Diakses dari <https://technojogja.com/bimtek-tata-naskah-dinas-untuk-sdm-di-setda-kabupaten-kota/>
- Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- Universitas Gadjah Mada (UGM). (2024). Analisis Implementasi Tata Naskah Dinas dalam Pembuatan Surat. *Jurnal Khazanah*.
- Universitas Medan Area. (tanpa tahun). BAB II: Landasan Teori. Diakses dari [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/619/5/118520019\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/619/5/118520019_file5.pdf) pada 4 Juli 2025
- Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

- Yunus, S. (2020). Masalah Penulisan Dinas di Instansi Pemerintah. Kumparan. Diakses dari <https://kumparan.com/syarif-yunus/masalah-penulisan-dinas-di-instansi-pemerintah-1tNOSquTr3N>
- Zharfan, Q. A., & Tauran. (2023). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan disiplin anggaran di Desa Cunggu (studi kasus pembangunan Pujasera Cunggu). Bali: Publika Press.
- Zharfan, Q. A., & Tauran. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Disiplin Anggaran di Desa Cunggu (Studi Kasus Pembangunan Pujasera Cunggu). Publika, 11(4), 2518–2532.